

ANALISIS PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL



JUNI 2025

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:

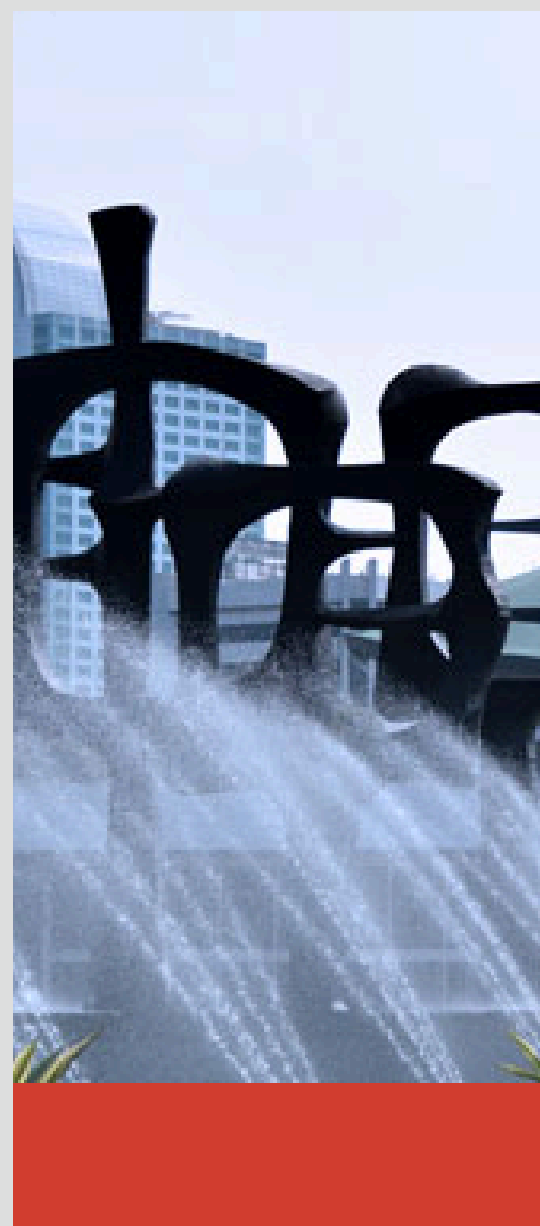
Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

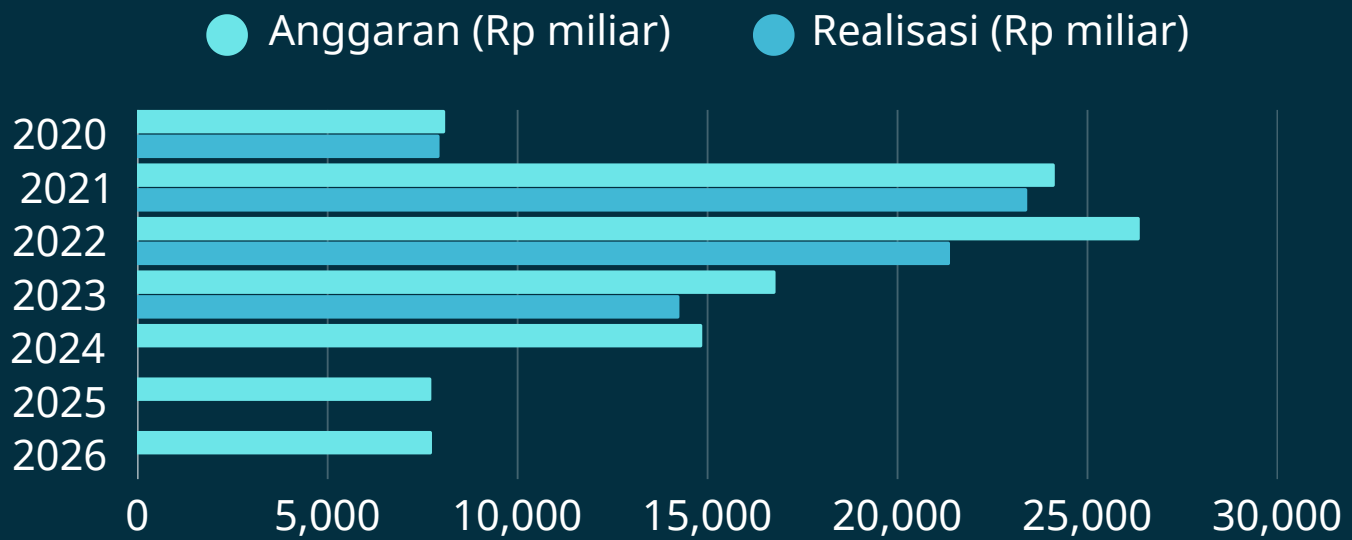
Penulis:

Robby A. Sirait, M.E., Ade Nurul Aida, M.E., Leo Iskandar, S.E.

Daftar Isi

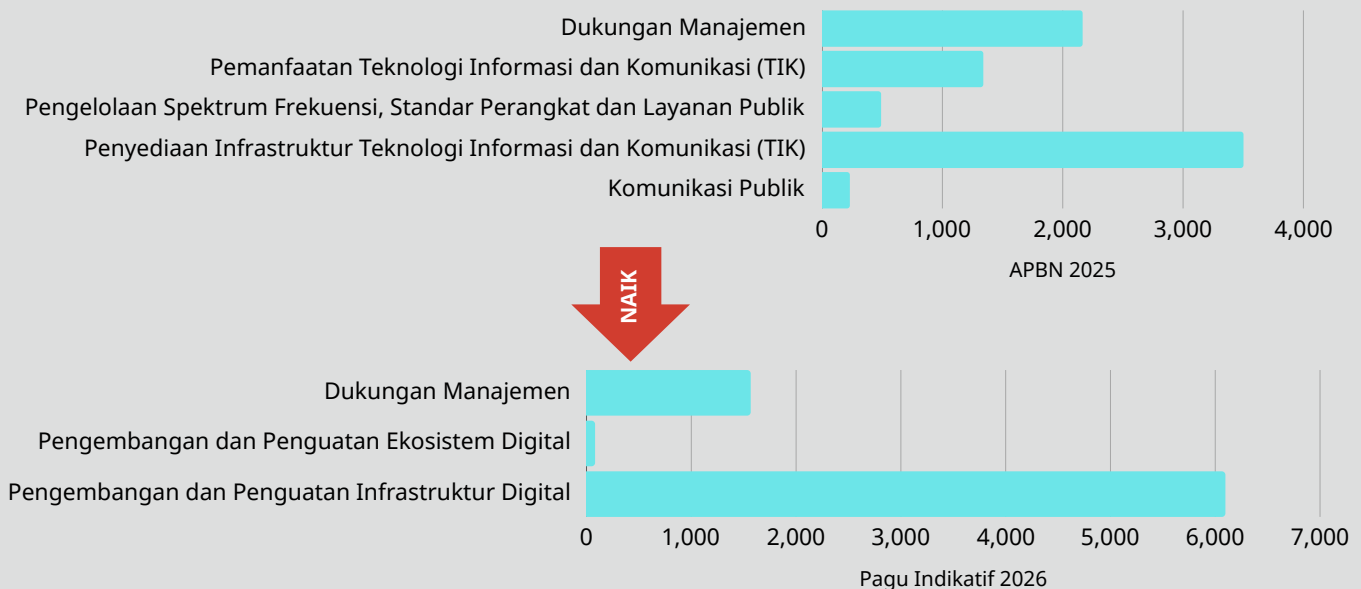
Pagu Indikatif 2026	02
Overview Anggaran 2020-2025	03
Output & Outcome Anggaran 2025	04
Komdigi dalam PN 01 RPJMN 2025-2029	06
Komdigi dalam PN 02 RPJMN 2025-2029	09
Komdigi dalam PN 03 RPJMN 2025-2029	11
Komdigi dalam PN 04 RPJMN 2025-2029	14
Komdigi dalam PN 05 RPJMN 2025-2029	15
Komdigi dalam PN 07 RPJMN 2025-2029	16
Isu Strategis	17





Laporan Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2024, Nota
Keuangan APBN 2025 dan KEM PPKF 2026

Pagu Indikatif 2026



Pagu Indikatif Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tahun 2026 sebesar Rp7.745,7 miliar, dengan rincian program Dukungan Manajemen Rp1.567 miliar, program pengembangan dan penguatan ekosistem dan ruang digital sebesar Rp81,7 miliar, dan program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital Rp6.097 miliar.

Nilai Pagu Indikatif 2026 tersebut meningkat sebesar 0,21 persen dibanding Alokasi Anggaran dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 7.728,9 miliar sebelum dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025.



Alokasi anggaran tahun 2025 hampir setengahnya anggaran tahun 2024

Realisasi anggaran periode 2020-2021 sudah sangat baik yakni mencapai 97-98%, namun ditahun 2022 realisasi turun drastis ke 81,1%, meskipun memiliki pagu tertinggi sepanjang periode 2020-2025 sebesar Rp26.376 miliar. Salah satu penyebab rendahnya realisasi tersebut yakni terdapat kendala dan hambatan dalam penyelesaian program dan kegiatan tahun 2022, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: kondisi geografis lokasi yang menjadi target sulit dijangkau, situasi keamanan yang kurang kondusif pada lokasi pelaksanaan program, dan adanya beberapa titik layanan akses internet yang mengajukan terminasi dikarenakan telah memiliki layanan akses internet secara mandiri (Laporan kinerja Kemkominfo 2022).

Alokasi anggaran tahun 2025, memiliki alokasi anggaran terendah sepanjang periode tersebut yakni sebesar Rp7.729 miliar, atau hampir setengahnya anggaran tahun sebelumnya (2024).



Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki proporsi alokasi anggaran terbesar dengan rata-rata 64,11%

Alokasi anggaran per program dalam periode 2021-2025 didominasi oleh Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan rata-rata sebesar 64,11%. Sejak 2022 terdapat penambahan program baru yakni program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan berjalan hingga saat ini. Sementara ditahun yang sama, Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika sudah tidak dijalankan.



Porsi belanja barang mendominasi jenis belanja lainnya Pada 2020-2025

Berdasarkan jenis belanjanya selama periode 2020-2025, secara rata-rata didominasi oleh belanja barang yakni sebesar 70,11%. Di antara ketiga jenis belanja, alokasi belanja modal cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan rata-rata sebesar 39,28% tiap tahunnya sejak tahun 2022.

Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 4



Target Keluaran/Output 2025

- BTS Last Mile 4G (Akumulatif), 7.300 (desa/kel)
- Akses Internet di Lokasi Layanan Publik (Akumulatif), 36.830 (lokasi)
- Satelit Multifungsi SATRIA-1, 150 (Gbps)
- Utilisasi Palapa Ring, 53 (%)
- Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR), 36 (Unit)
- Fasilitas Literasi Digital, 8.000 (Orang)
- Fasilitas Startup Digital Aktif, 60 (Startup)
- Fasilitas Akselerasi Startup Game, 45 (Startup)
- Penanggulangan Konten Internet Negatif, 200.000 (Konten)
- *Digital Talent Scholarship* (DTS), 199.200 (Orang)
- Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika, 730 (Orang)
- Diseminasi Informasi Bidang Polhukam, 415 (Kegiatan)
- Diseminasi Informasi Bidang PMK, 400 (Kegiatan)
- Diseminasi informasi Bidang Perekonomian dan Maritim, 469 (Kegiatan)
- Diseminasi Informasi Pemindahan Ibu Kota Negara, 222 (Kegiatan)
- Prasarana *Digital Broadcasting System* (DBS), 6 (Lokasi)

Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 5

→ Target Outcome

- Terselenggaranya Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika
- Terwujudnya infrastruktur monitoring dan manajemen spektrum frekuensi radio
- Meningkatnya Literasi Digital Masyarakat
- Meningkatnya Pengembangan Startup Digital
- Terwujudnya Implementasi UU ITE dan PP 71 Tahun 2019
- Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
- Meningkatnya jangkauan penyebaran informasi dan program prioritas pemerintah
- Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyebaran Digital

Komdigi dalam PN 01 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 1 (PN 01) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		
PROGRAM PRIORITAS (PP)	01.01 Penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional	01.02 Penguatan Komunikasi Publik dan Media	
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Menguatnya Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Terciptanya ekosistem komunikasi, kebebasan pers dan media massa yang berintegritas	
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	02. Indeks Aktualisasi Pancasila	1) Indeks Kemerdekaan Pers; 2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik; 3) Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	01.01.02 Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA	01.02.01 Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggungjawab Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	01.02.02 Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	Meningkatnya kohesivitas sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat multikultural yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila	Terwujudnya kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, bertanggungjawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri.	Terbangunnya sistem komunikasi dan jaminan kesetaraan hak masyarakat atas informasi publik
INDKATOR KEGIATAN PRIORITAS	06. Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila	01. Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku 02. Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers 03. Persentase Independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat	01. Jumlah kebijakan yang mendukung implementasi SKPN 02. Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM bidang kominfo yang bertalenta digital 03. Persentase akses & diseminasi informasi publik kepada masyarakat

		04. Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola yang baik 05. Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers 06. Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan 07. Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan pers	04. Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik 05. Persentase badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik 06. Persentase jaminan hukum atas akses informasi publik 07. Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik
--	--	---	--

Komdigi berkewajiban menjalankan kegiatan prioritas “Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA” dalam mendukung PP 01.01 pencapaian Prioritas Nasional 01, dengan target pencapaian indikator kegiatan prioritas “Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila”.

TARGET INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS

Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila di 2029 ditargetkan sebesar 100%.

PROYEK PRIORITAS

Untuk mencapai target indikator kegiatan prioritas tersebut, proyek prioritas yang dilakukan yakni berupa penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi informasi berlandaskan nilai-nilai pancasila

Komdigi berkewajiban menjalankan PP 01.02 “Penguatan Komunikasi Publik dan Media” dalam mendukung Prioritas Nasional 01, dengan menjalankan 2 KP yakni KP 01.02.01 dan 01.02.02.

TARGET INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS

- Indeks Kemerdekaan Pers di 2029 ditargetkan sebesar 72,00 dengan baseline 2024 sebesar 69,36
- Indeks Keterbukaan Informasi Publik ditargetkan sebesar 77,25 dengan baseline 2024 sebesar 75,65.
- Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik ditargetkan sebesar 75 dengan baseline 2024 sebesar 69,80 (2023).

TARGET INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS

Target Indikator KP 01.02.01

- Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku di 2029 ditargetkan mencapai 3,35 dengan baseline 2024 sebesar 3,15

Target Indikator KP 01.02.02

- Jumlah kebijakan yang mendukung implementasi SKPN ditargetkan mencapai 3 dokumen dengan baseline 2024 sebanyak 11 dokumen

PROYEK PRIORITAS

- Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers di 2029 ditargetkan mencapai 68,00% dengan baseline 2024 sebesar 65,80%.
- Persentase Independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat di 2029 ditargetkan mencapai 68,00% dengan baseline 2024 sebesar 65,69%.
- Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola yang baik di 2029 ditargetkan mencapai 66% dengan baseline 2024 sebesar 63,74%.
- Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers di 2029 ditargetkan mencapai 72,50% dengan baseline 2024 sebesar 70,12%.
- Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan di 2029 ditargetkan mencapai 71,50% dengan baseline 2024 sebesar 69,08%.
- Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan pers di 2029 ditargetkan mencapai 2.384 orang dengan baseline 2024 sebanyak 2.015 orang.

Untuk mencapai target KP 01.02.01 dalam menopang pencapaian target indikator PP 01.02, Proyek Prioritas yang akan dilakukan yakni (a) Peningkatan kapasitas lembaga pers (b) Peningkatan kompetensi dan etika insan pers dan (c) Penyehatan media arus utama.

- Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM bidang kominfo yang bertalenta digital ditargetkan mencapai 200.300 orang dengan baseline 2024 sebanyak 141.300 orang.
- Persentase akses & diseminasi informasi publik kepada masyarakat ditargetkan mencapai 78,73% dengan baseline 2024 sebesar 77,48%.
- Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik ditargetkan mencapai 78,73% dengan baseline 2024 sebesar 75,68%.
- Persentase badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik ditargetkan mencapai 77,50% dengan baseline 2024 sebesar 76,25%.
- Persentase jaminan hukum atas akses informasi publik ditargetkan mencapai 81,17% dengan baseline 2024 sebesar 79,92%.
- Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik ditargetkan mencapai 77,58% dengan baseline 2024 sebesar 76,33%.

Untuk mencapai target KP 01.02.02 dalam menopang pencapaian target indikator PP 01.02, Proyek Prioritas yang akan dilakukan yakni (a) Penguatan kelembagaan dan sistem komunikasi publik dan pembangunan nasional (b) Pelaksanaan keterbukaan informasi publik (c) Peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika yang bertalenta digital.

Komdigi dalam PN 02 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 2 (PN 02) Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
PROGRAM PRIORITAS (PP)	02.14 Ekonomi Digital	
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Peningkatan pengembangan ekonomi digital untuk memperkuat kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	02.14.001 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	02.14.002 Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	Meningkatnya Jumlah SDM Digital	Meningkatnya pengembangan ekonomi dan industri digital
INDKATOR KEGIATAN PRIORITAS	01. Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif) 02. Proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)	01. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis 02. Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital) 03. Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI) 4.0) > 3.0 04. Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB

Komdigi berkewajiban menjalankan KP 02.14.001 “Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital” dan KP 02.14.002 “Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya” guna mendukung pencapaian PP 02.14 “Ekonomi Digital” dengan indikator Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB yang ditargetkan 12-13% pada 2029.

TARGET INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS

Target Indikator KP 02.14.001

- Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif) di 2029 ditargetkan sebesar 5,21% dengan baseline 2024 sebesar 3%.
- Proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) di 2029 ditargetkan sebesar 90% dengan baseline 2024 sebesar 79%(2023).

Target Indikator KP 02.14.002

- Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis di 2029 ditargetkan sebesar 41,70 dengan baseline 2024 sebesar 39,12 (2020)
- Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital) di 2029 ditargetkan sebesar 15%.

PROYEK PRIORITAS

Untuk mencapai target KP 02.14.001 dalam menopang pencapaian target indikator PP 02.14, Proyek Prioritas yang akan dilakukan yakni (a) pengembangan SDM digital dan digitalisasi masyarakat, (b) Penguatan Infrastruktur dan perlindungan keamanan data, (c) Riset dan pengembangan ekosistem ekonomi digital dan (d) pengembangan regulasi, pendanaan dan Iklim bisnis.

- Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI) 4.0) > 3.0 di 2029 ditargetkan sebesar 156
- Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB di 2029 ditargetkan sebesar 4,4% dengan baseline 2024 sebesar 4,3%

Untuk mencapai target KP 02.14.001 dalam menopang pencapaian target indikator PP 02.14, Proyek Prioritas yang akan dilakukan yakni (a) Pengembangan industri dan perangkat digital, (b) Penguatan pengembangan ekonomi digital UMKM, (c) Pengembangan digitalisasi perdagangan, (d) Pengembangan keuangan dan perbankan digital, (e) Pengembangan digitalisasi pertanian dan perikanan, (f) Pengembangan media digital, (g) Pengembangan digitalisasi transportasi dan pariwisata, (h) Pelayanan kesehatan digital, (i) Pengembangan kesehatan digital, (j) Pengembangan digitalisasi pendidikan, (k) Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah , dan (l) Pengembangan digitalisasi sektor energi dan lingkungan.

Komdigi dalam PN 03 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 3 (PN 03) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi		
PROGRAM PRIORITAS (PP)	03.02 Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik		
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Meningkatnya pembangunan TIK di tingkat nasional	Meningkatnya transformasi digital	
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) nasional	Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	03.02.01 Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran	03.02.02 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	01. Meningkatnya cakupan dan kualitas di bidang telekomunikasi, pos dan penyiaran	02. Meningkatnya kualitas internet pita lebar (broadband) nasional	01. Meningkatnya ekosistem digital untuk mendukung pemerintah dan masyarakat digital
INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	01. Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan 02. Integrated Index for Postal Development (2IPD) 05. Jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) per populasi 06. Pelanggan terlayani pita lebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga 07. Pengguna internet	01. Kecepatan internet jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) 02. Kecepatan internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) 03. Rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita	01. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat 02. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah 03. Kapasitas pusat data per kapita 04. Indeks Ruang Digital Kondusif

Komdigi berkewajiban menjalankan PP 03.02 “Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik”, dengan sasaran: Meningkatnya pembangunan TIK di tingkat nasional dan Meningkatnya transformasi digital.

**TARGET INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
PRIORITAS**

Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) nasional di 2029 ditargetkan sebesar 6,30 dengan baseline 2024 sebesar 5,90 (2023).

Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) di 2029 ditargetkan sebesar 52,53 dengan baseline 2024 sebesar 49,20 (2022).

Dalam mewujudkan kedua sasaran tersebut, Komdigi berkewajiban menjalankan KP 03.02.01 “Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran” dan KP 03.02.02 “Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital”

**TARGET INDIKATOR
KEGIATAN
PRIORITAS**

**Target
Indikator KP
03.02.01
(Sasaran KP 1):**

- Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan di 2029 ditargetkan mencapai 90% dengan baseline 2024 sebesar 70,53% (2023).
- Integrated Index for Postal Development (2IPD) di targetkan sebesar 78 pada 2029, dengan baseline 2024 sebesar 50 (2022).

**Target
Indikator KP
03.02.01
(Sasaran KP 1):**

- Kecepatan internet jaringan pita lebar tetap (*fixed broadband*) di 2029 ditargetkan mencapai 100Mbps dengan baseline 2024 sebesar 32,10Mbps.
- Kecepatan internet jaringan pita lebar bergerak (*mobile broadband*) di 2029 ditargetkan mencapai 100Mbps dengan baseline 2024 sebesar 38,91 Mbps (2023).

Target Indikator KP 03.02.02:

- Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat di 2029 ditargetkan mencapai 52,24 dengan baseline 2024 sebesar 51,75(2022).
- Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah di 2029 ditargetkan mencapai 57,65 dengan baseline 2024 sebesar 51,13 (2022).
- Kapasitas pusat data per kapita di 2029 ditargetkan mencapai 6,87 dengan baseline 2024 sebesar 0,74.
- Indeks Ruang Digital Kondusif di 2029 ditargetkan mencapai 3,8 (indikator baru).

- Jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) per populasi di 2029 ditargetkan mencapai 98% dengan baseline 2024 97,16% (2023).
- Pelanggan terlayani pita lebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga di 2029 ditargetkan mencapai 50% dengan baseline 2024 20,82% (2023).
- Pengguna internet di 2029 ditargetkan mencapai 87,50% dengan baseline 2024 79,50%
- Rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita di 2029 ditargetkan mencapai 2,50% dengan baseline 2024 8,41% (2021).

PROYEK PRIORITAS

Untuk mencapai target Indeks Pembangunan TIK (IPTIK), terdapat beberapa proyek prioritas, antara lain: (a) Pemerataan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, (b) Pemerataan dan pemenuhan layanan pos dan logistik digital, (c) Pengembangan regulasi dan pendanaan dukungan infrastruktur digital, dan (d) Pengelolaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi dan satelit

Untuk mencapai target Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN), terdapat beberapa proyek prioritas, antara lain: (a) Peningkatan Infrastruktur Pendukung layanan publik digital, (b) Peningkatan layanan masyarakat dan pemanfaatan ruang digital, (c) Pengembangan regulasi, kelembagaan, tata kelola, dan pendanaan, (d) Riset dan pengembangan ekosistem digital, (e) Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi Superplatform, dan (f) Pengembangan dan pemanfaatan emerging technology.

Komdigi dalam PN 04 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 4 (PN 04) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
PROGRAM PRIORITAS (PP)	04.19 Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	04.19.03 Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan melalui peningkatan kapasitas, akses terhadap peluang kerja, dan ekosistem kewirausahaan serta penguatan kebijakan yang ramah perempuan dan keluarga
INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	Indeks literasi digital

Komdigi berkewajiban menjalankan KP 04.19.03 “Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan” guna mendukung pencapaian PP 04.19 “Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan”.

TARGET INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS

Indeks literasi digital di 2029 ditargetkan sebesar 3,74 (laki-laki) dan 3,76 (perempuan) dengan baseline 2024 sebesar 3,56 (laki-laki) 3,42 (perempuan) (2023)

Komdigi dalam PN 05 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 5 (PN 05) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
PROGRAM PRIORITAS (PP)	05.03 Optimalisasi integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional	
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	05.03.03 Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik	05.03.05 Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik dalam negeri	Meningkatnya ekspor jasa dan produk kreatif
INDKATOR KEGIATAN PRIORITAS	02. Pertumbuhan sektor pos logistik	01. Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi

Komdigi berkewajiban menjalankan KP 05.03.03 “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik” dan KP 05.03.05 “Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif” guna mewujudkan pencapaian PP 05.03 “Optimalisasi integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional” dalam menopang PN 04.

TARGET INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS

- Pertumbuhan sektor pos logistik di 2029 ditargetkan sebesar 11,5% dengan baseline 2024 sebesar 9,16%
- Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi ditargetkan sebesar 4,01 miliar USD dengan baseline 2024 sebesar 2,37 miliar USD (2022)

PROYEK PRIORITAS

Untuk mencapai target pertumbuhan sektor pos logistik, proyek prioritas yang dilakukan yakni peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang logistik dan peningkatan produktivitas dan daya saing penyedia jasa logistik

Komdigi dalam PN 07 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 7 (PN 07) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
PROGRAM PRIORITAS (PP)	07.10 Pemerintah digital
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	07.10.02 Penguatan Teknologi Pemerintah Digital
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	Tersedianya teknologi pemerintah digital yang berkualitas dan tangguh
INDKATOR KEGIATAN PRIORITAS	01. Persentase instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP 02. Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP

Komdigi berkewajiban menjalankan KP 07.10.02 “Penguatan Teknologi Pemerintah Digital” guna mewujudkan pencapaian PP 07.10 “Pemerintah Digital” dalam menopang PN 05.

TARGET INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS

- Persentase instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP di 2029 ditargetkan sebesar 100%.
- Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP di 2029 ditargetkan sebesar 15%.

PROYEK PRIORITAS

Untuk mencapai target Persentase instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP dan Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP, proyek prioritas yakni penguatan infrastruktur pemerintah digital, penguatan aplikasi pemerintah digital, dan penguatan keamanan siber pemerintah

Isu Strategis

Belum Meratanya Cakupan Layanan Broadband di Indonesia

Dari total 83.218 desa/kelurahan yang ada di Indonesia, hingga tahun 2023, masih ada 2.695 desa/kelurahan yang belum mendapatkan akses jaringan 4G (254 desa/kelurahan berada di wilayah non-3T, 2.441 lainnya berada di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)). Sementara itu, dari total 7.230 kecamatan, baru 4.714 (65,2%) yang telah tersambung dengan jaringan serat optik. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya jurang digital yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan lebih dari sepertiga kecamatan di Indonesia masih belum terlayani oleh infrastruktur serat optik yang memadai.

Penyediaan akses internet bagi layanan publik yang belum terhubung seluruhnya

Pada akhir tahun 2020, masih terdapat sekitar 150.000 titik dari total 501.112 layanan publik yang belum memiliki akses internet yang layak hingga akhir tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui BAKTI telah menyediakan akses internet di 18.541 titik layanan publik. Meskipun begitu, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Untuk itu, percepatan dan perluasan program akses internet harus terus ditingkatkan agar semua layanan publik dapat berjalan secara optimal.

Utilisasi Palapa Ring dibawah 50%

Rendahnya utilisasi Palapa Ring merupakan masalah yang sedang dihadapi, dengan tingkat penggunaan jaringan sebesar 48,01% di tahun 2023.

Telekomunikasi yang Belum Maksimal

Layanan fixed broadband (FBB) di Indonesia masih tergolong mahal, dengan tarif rata-rata sebesar \$28,05 per bulan, lebih tinggi dibandingkan Vietnam (\$8,72), Tiongkok (\$18,81), dan Thailand (\$22,56). Dari segi kecepatan, FBB di Indonesia juga masih tertinggal, dengan kecepatan rata-rata hanya 32,10 Mbps, jauh di bawah Thailand (236,12 Mbps), Vietnam (153,21 Mbps), dan Malaysia (120,80 Mbps). Sementara itu, meskipun harga layanan mobile broadband di Indonesia cukup bersaing yakni \$0,28 per GB, tantangan tetap ada pada aspek kecepatan dan kualitas layanan yang masih belum optimal untuk mendukung perluasan akses internet secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

**Belum Optimalnya
Pemanfaatan
Spektrum
Frekuensi Radio**

Pada tahun 2023, Kementerian Komdigi berhasil meningkatkan kapasitas spektrum frekuensi radio hingga mencapai 1.690 MHz, melampaui target awal sebesar 1.310 MHz yang direncanakan untuk dicapai hingga tahun 2024. Namun demikian, tingkat pemanfaatan spektrum tersebut masih belum maksimal. Ketidakseimbangan antara jumlah spektrum yang tersedia dengan penggunaannya berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan frekuensi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekosistem digital di Indonesia.

**Ketiadaan pusat
data terpadu dalam
sektor
pemerintahan
masih menjadi
kendala.**

Saat ini, pemerintah pusat dan daerah mengelola sekitar 2.700 pusat data atau ruang server, namun hanya sekitar 3% yang memenuhi standar internasional. Selain menimbulkan potensi inefisiensi dan risiko terhadap keamanan informasi, penyebaran data yang tidak terpusat juga menyulitkan integrasi layanan publik serta menghasilkan tingkat perjanjian layanan (SLA) yang rendah, sehingga menghambat realisasi pemerintahan berbasis elektronik secara optimal.

**Kebutuhan akan
SDM digital masih
belum terpenuhi
secara optimal.**

Berdasarkan laporan Digital Economy Outlook 2025, Indonesia diperkirakan memerlukan sekitar 9 juta talenta digital terampil hingga tahun 2030. Program Digital Leadership Academy (DLA), yang ditujukan bagi para pemimpin di sektor publik dan swasta, telah melatih sebanyak 654.083 SDM digital sejak dimulai pada tahun 2020. Namun, jumlah ini masih jauh dari target, dengan kesenjangan lebih dari 8,4 juta talenta. Selain itu, hasil survei Indeks Literasi Digital menunjukkan bahwa skor Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2023 berada di angka rata-rata 3,65 dari skala 5, yang tergolong dalam kategori sedang. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk memperluas akses pelatihan, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta mengembangkan program pengembangan SDM digital yang lebih terarah dan efektif guna mencapai target nasional.



Follow Kami



www.bkd.dpr.go.id



[pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)